

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ardiansyah. 2023. *Hukum Perizinan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. 2024. *Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 2019. *Buku Panduan Tugas Akhir*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Gumilar Rusliwa Somantri. 2015. *Memahami Metode Kualitatif*. Jakarta: Makara Human Behavior Studies in Asia.
- Muhammad Nasir. 2013. *Lintas Transit di Selat Malaka: Hak dan Tanggung Jawab Indonesia dan Malaysia*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (Sign).
- Purba, Daniel Ferdinand. 2024. *Penataan Penegakan Hukum Maritim: Menuju Indonesia Maju*. Yogyakarta: CV. Gita Lentera.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subagiyo, Aris, Wawargita Permata Wijayanti, dan Dwi Maulidatuz Zakiyah. 2017. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Suryanti, Supri Haryono, dan Sutrisno Anggoro. 2019. *Wilayah Pengelolaan Pesisir Terpadu*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Ulum, M. Chazienul, dan Rispa Ngindana. 2017. *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Yulianti Ningsih, Aryuni, Noer Indrianti, dan Wismanningsih. 2022. *Hukum Laut*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP Tahun 2020 tentang Lokasi dan Pemanfaatan Ruang Pesisir Laut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pesisir Laut

C. Jurnal dan Skripsi

Akademi Maritim Aceh Darussalam. 2024, "Pemanfaatan Perairan Pesisir Untuk Kegiatan Usaha Di Tinjau Dari Segi Hukum Di Wilayah Aceh Besar." *USK Law Journal*, Vol. 5, No. 2.

Akili Rustam Hs, 2022, "Prosedur Penyelesaian Masalah Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten Kota Di Provinsi Gorontalo", *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 1.

David Tan, 2021, "Metode Penelitian Hukum Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8.

Ekosafitri Kurniawati Hapsari, 2017, "Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah Studi Kasus Kabupaten Jepara", *Journal Of Regional And Rural Development Planning*, Vol. 1, No. 2.

Fauzan Dzaky, Taufiqur Rachman, dan Muhammad Fadly, 2023, "Evaluasi Aspek Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pesisir Laut PKKPRL Sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2023", *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, Vol. 2, No. 1.

- Gumilar Rusliwa Somantri, 2015, "Memahami Metode Kualitatif", *Makara Human Behavior Studies In Asia*, Vol. 9, No. 2.
- Hasan Basri, 2020, "Pengelolaan Pengawasan Kawasan Pesisir Dan Laut Di Indonesia", *REUSAM Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2.
- Huliselan Niette, 2023, "Konektivitas Kawasan Konservasi Terumbu Karang Mangrove Dan Lamun Dan Sumber Daya Ikan", *Blue*, Vol. 2, No. 1.
- Huznul Faidzin, 2023, "Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Kab Pinrang Pada Area Lansirang Park Berdasarkan Perda No 14 Tahun 2012 Tentang RTRW", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kornelius Yusuf, 2024, "Urgensi Pencabutan Perizinan Kegiatan Tambang Pasir Laut Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir", *Hukum Inovatif Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2.
- Laksito Joni dan Dyah Listyarini, 2024, "Hukum Perizinan", *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, Vol. 2, No. 1.
- Lasabuda Ridwan, 2013, "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Platax*, Vol. 1, No. 2.
- Maskur Ali, 2008, "Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang", *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Muhammad Afif dan Muhamad Adystia Sunggara, 2025, "Analisis Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Usaha Bidang Perikanan", *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 8, No. 1.
- Permata Dyah Putri, 2014, "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan", *Skripsi*, Universitas Airlangga.
- Priyanta Maret, 2021, "Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pesisir Laut Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1.
- Resdianto Willem, 2018, "Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Laut Yang Berkeadilan", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 2, No. 3.
- Rokhimin Dahuri, 2001, "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 2.
- Sangki Caren April Ashley Theressa, 2024, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang", *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 2.

Willem Resdianto, 2018, "Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Laut Yang Berkeadilan", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 2, No. 2.

Yurista Ananda Prima dan Dian Agung Wicaksono, 2017, "Kompatibilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil RZWP3K Sebagai Rencana Tata Ruang Yang Integratif", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 2.

D. Internet

Farhan Arda Nugraha, "KKP tertibkan resor tanpa dokumen izin PKKPR di Aceh Besar", <https://www.antaranews.com/berita/3700767/kkp-tertibkan-resor-tanpa-dokumen-izin-pkkpr-di-aceh-besar>, diakses pada tanggal 4 Desember 2024.